

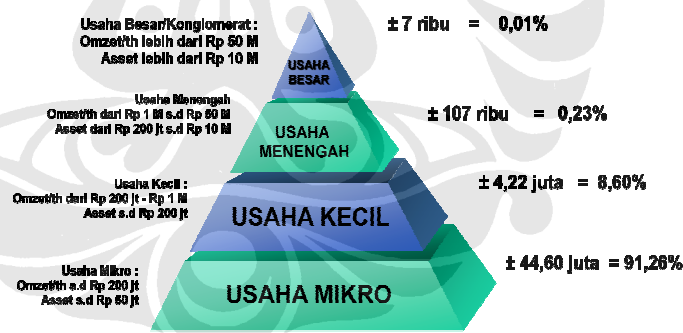
# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Data tahun 2007 yang disampaikan oleh BPS menunjukkan bahwa di Indonesia, Usaha Mikro (UM) yang beroperasi berjumlah 44,6 juta unit atau mencapai 91,26% dari keseluruhan unit usaha negara ini. Kontribusi kelompok ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp 1.778 Trilyun atau 53,3% dengan nilai investasi yang mencapai angka Rp 369,8 Trilyun. Data lain menunjukkan bahwa dari 93.4 juta angkatan kerja di Indonesia terdapat 42.5 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri, dimana 24.3 juta unit adalah usaha mikro yang umumnya berada di daerah yang tertinggal. Pada usaha mikro tersebut, bekerjalah *economically active poor* yang masih sulit mengakses *micro-banking*. Hanya sekitar 9% yang dilayani bank umum dan baru sekitar 3% yang dilayani BPR.<sup>1</sup>

Bagan I. 1. Kondisi UMKM di Indonesia



SUMBER: BAHAN DISKUSI DATA UM/KM TAHUN 2004, BPS 2007  
UU No. 10/1998 Rp Usaha Kecil  
PP No. 20/1999 Rp Peredaran dan Penyelenggaraan Usaha Kecil  
Instruksi No. 10/1998 Rp Penyelenggaraan Usaha Menengah

Sumber: BPS, 2007.

Data-data diatas bisa mengantarkan kita pada pemahaman yang meyakini bahwa salah satu solusi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah

<sup>1</sup> Haidlir, dkk. Bahan Diskusi Peserta Lokakarya Nasional: Memantapkan Pola Linkage Bank – LKM dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro. Jakarta: UKM Center FEUI, 2008.

manakala usaha mikro bisa ditingkatkan potensi, daya saing dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha mikro.

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro oleh pemerintah baik pusat maupun daerah telah dan akan terus dilakukan, walaupun sejauh ini indikator pengentasan kemiskinan serta perluasan lapangan kerja di daerah tertinggal, pedesaan dan pesisir, kinerjanya masih belum memuaskan. Program IDT, Dana Bergulir, dan program pemerintah lainnya masih belum dirasakan *sustainability* atau keberlanjutannya. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi di daerah dimana tata cara pemantapan sasaran dan mekanisme penyampaian diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas institusi pemerintah tanpa distorsi pasar yang berlebihan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan adalah memberdayakan usaha mikro melalui akses pembiayaan yang mudah dan tanpa jaminan, karena memang permasalahan utama usaha mikro adalah permodalan. Usaha ini dapat dilakukan melalui Lembaga keuangan mikro (yang selanjutnya disebut LKM). LKM dipilih karena banyak sekali usaha mikro yang *feasible* secara bisnis akan tetapi tidak *bankable* untuk proses pengajuan kredit ke lembaga keuangan. LKM diyakini bisa menjembatani permasalahan akses usaha mikro terhadap kredit yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI) menurut Rudjito (2003)<sup>2</sup> merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Sedangkan pengertian usaha mikro menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. LKM berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya karena ditujukan khusus bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat miskin tidak tersentuh oleh lembaga keuangan semacam Bank karena belum *bankable*, seperti tidak adanya aset yang dapat dijadikan

---

<sup>2</sup> Rudjito. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan*. [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).

agunan, skala usahanya yang terlalu kecil dan dianggap kreditnya beresiko tinggi. LKM masuk untuk mengisi kekosongan pelayanan jasa keuangan bagi rakyat miskin yang umumnya tinggal di pedesaan yang tidak terjangkau oleh perbankan, baik dari segi lokasi maupun strata ekonomi.

Pemahaman mengenai LKM sendiri sering disalahpahami dari pengertian sebenarnya. Beberapa orang melihat dengan adanya kata mikro berarti lembaga tersebut harus juga berukuran mikro, sehingga LKM yang berskala besar tidak lagi disebut LKM. Pengertian ini menjadi sesat karena disebut LKM bukan karena ukurannya akan tetapi karena jenis pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan pengusaha mikro. Mengenai ukuran suatu LKM yang dilihat dari jumlah dana yang dikelola, jumlah kantor cabang, jumlah nasabah, jumlah staf dan sebagainya tidak berhubungan dalam penyebutan LKM (Ismawan, 2003). Bahkan sebaiknya LKM harus berukuran besar, karena ia melayani kredit berskala mikro yang tentunya memiliki biaya operasional yang relatif besar dibanding lembaga keuangan lainnya yang melayani masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Sehingga untuk dapat terus berjalan dan berkesinambungan LKM harus mencapai jumlah nasabah yang besar.

Sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berawal dari dibentuknya Badan Kredit Desa. Dimulai dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga ini banyak digunakan sebagai bahan studi banding oleh negara dunia ketiga dalam mengembangkan Keuangan Mikro (Rudjito, 2003).

Di dunia internasional dikenal sebuah lembaga keuangan mikro yang dinilai berhasil dijalankan di beberapa negara yang bermula dari Bangladesh, yaitu Grameen Bank. Grameen Bank atau Bank Desa dalam bahasa Bengali adalah lembaga keuangan mikro yang ditujukan bagi masyarakat termiskin yang umumnya tinggal di pedesaan. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, adalah seorang profesor ekonomi. Ia mendapat beasiswa *fullbright* di Vanderbilt University hingga Ph.D dan menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Chittagong

University. Yunus memulai proyek grameen bank di desa Jobra pada tahun 1976 sebelum resmi mendirikan Grameen Bank sebagai lembaga keuangan yang independen pada tahun 1983. Grameen Bank mengakomodir masyarakat termiskin yang tidak memiliki aset sebagai jaminan untuk mendapat bantuan kredit.

Grameen Bank memberikan kredit kepada masyarakat termiskin di sebuah desa, sehingga perlu adanya kejelasan kriteria dan adanya seleksi untuk menentukan masyarakat termiskin yang layak untuk mendapat kredit. Dalam perjalanannya, Grameen Bank memberikan prioritas kepada wanita untuk menerima kredit dibandingkan kepada pria, karena untuk usaha mikro, wanita dinilai lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan melunasi kreditnya. Dalam prakteknya, Grameen Bank membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota. Kelompok ini berfungsi sebagai kontrol dan supervisi terhadap kredit dari masing-masing anggota. Kelompok ini berkumpul seminggu sekali dengan kelompok lain di satu center. Setiap center biasanya terdiri dari 8 hingga 10 kelompok. Kumpulan *center* ini diisi dengan proses pengembalian pinjaman, pembinaan oleh staf Grameen dan mengucapkan 16 ikrar Grameen Bank<sup>3</sup>.

Grameen Bank di Bangladesh terbukti berhasil menjadi sebuah sistem pembiayaan kredit bagi pengusaha mikro. Berawal dari sebuah desa Jobra (dekat Chittagong University) dengan 42 masyarakat miskin peminjam di tahun 1976, kini berdasarkan data Januari 2008, Grameen telah melayani 80.949 desa (96% dari total desa di Bangladesh), dan mencakup 7,44 juta masyarakat termiskin (97% adalah wanita). Berdasarkan data pada tabel I.1, Grameen Bank berhasil mengangkat banyak anggotanya dari semula dikategorikan miskin, menjadi di atas miskin. Dari 15,1% anggota Grameen Bank yang di atas garis kemiskinan ditahun 1997, menjadi 58,4 persen di tahun 2005 (Dowla dan Barua, 2006)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Dalam ikrar Grameen Bank di Bangladesh, ditekankan tidak hanya masalah kredit tetapi juga menyentuh masalah kesejahteraan, standar hidup yang baik dan berwawasan lingkungan, misalnya agar nasabahnya menanam sayuran, memperbaiki rumah, meminimalkan jumlah anak, mengutamakan pendidikan anak-anaknya, menjaga kebersihan, memakai toilet, minum air bersih, mendamaikan anggota yang bertikai, aktif dalam kegiatan sosial dan 7 ikrar lainnya.

<sup>4</sup> Dowla, Asif dan Barua, Dipal. *the Poor Always Pay Back*. Connecticut: Kumarian Press, 2006.

Tabel I. 1. Persentase Anggota Grameen Bank yang Hidup di Atas Garis Kemiskinan

Tahun	Persentase anggota yang hidup di atas garis kemiskinan
1997	15,1 %
1998	20,4 %
1999	24,1 %
2000	40,0 %
2001	42,0 %
2002	46,5 %
2003	51,1 %
2004	55,0 %
2005	58,4 %

Sumber: Departemen Monitoring dan Evaluasi Grameen Bank (Dowla dan Barua 2006)

Setelah berhasil di Bangladesh, Yunus mulai menularkan keberhasilan pola Grameen Bank ke negara-negara lain. India, Vietnam, Filipina, Malaysia, Sudan, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sudah mulai mereplikasi sistem Grameen Bank di negaranya. Bahkan sistem ini juga berhasil direplikasi di Amerika yang merupakan negara maju dan di daerah perkotaan di China. Replikasi Grameen Bank di beberapa negara tersebut disokong oleh Grameen Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang bermarkas di New York.

Pada tahun 1997, atas prakarsa M. Yunus dan dukungan dari ibu negara AS saat itu, Hillary Clinton, Ratu Spanyol dan lainnya, diadakan *Microcredit Summit* yang pertama kali di Washington. Hasil pertemuan tersebut antara lain kesepakatan 4 prinsip dasar untuk menjalankan Lembaga Keuangan Mikro. Prinsip tersebut adalah: menjangkau masyarakat termiskin, menjangkau dan memberdayakan wanita, membangun kesinambungan (*sustainability*) finansial, serta memastikan adanya dampak yang terukur (Budiantoro, 2005). Grameen Bank menjadi sebuah sistem LKM yang sudah diakui di tingkat dunia sebagai *best*

*practice microfinance institutions* (MFI) karena memenuhi 4 prinsip LKM tersebut.

Tahun 2006 Muhammad Yunus meraih penghargaan Nobel Perdamaian atas jasa-jasanya dalam mencegah akar konflik dan perang, yaitu kemiskinan. Penghargaan ini adalah wujud dari keberhasilan dan pengakuan dunia internasional atas peran Grameen Bank dalam menolong jutaan orang miskin untuk mengakses modal. Penghargaan ini semakin membuktikan eksistensi dan kapabilitas sistem Grameen Bank untuk menghapus kemiskinan di dunia.

Di Indonesia kita mengenal berbagai macam program pemberdayaan keuangan mikro baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Dalam sejarahnya, penyaluran dana pinjaman mikro bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui LKM banyak yang mengalami kegagalan. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dijalankan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dananya dikelola oleh Dewan Kelurahan dengan anggotanya dipilih masyarakat, dalam prakteknya tingkat kemacetannya (*non performing loan*) hingga 40%<sup>5</sup>. Program dana bergulir yang dijalankan oleh pemerintah propinsi Kepulauan Riau tingkat kemacetannya bahkan mencapai 90%<sup>6</sup>.

Sebenarnya kegagalan LKM tidak hanya karena kesalahan sistem yang digunakan melainkan juga karena dasar pembentukannya dan paradigma yang dianut. Pertama, LKM sebagai lembaga masyarakat *grass root* seharusnya dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat akan lembaga ini (*bottom-up*). Sedangkan yang terjadi selama ini adalah kebanyakan LKM dibentuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana pinjaman murah yang disubsidi tanpa meneliti lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat miskin, sehingga seringkali LKM yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kedua, dana-dana pinjaman murah yang disubsidi pemerintah justru membuat LKM yang dibentuk menjadi tidak *sustain*. LKM yang melayani kredit skala mikro dan kecil yang berbiaya operasional besar diharuskan mengenakan bunga yang lebih ringan dibanding perbankan yang

---

<sup>5</sup> UKM Center FEUI. *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DKI*. Depok, 2005.

<sup>6</sup> LPEM FEUI dan UKM Center FEUI. *Studi Evaluasi Dana Bergulir Kepulauan Riau*. Jakarta, 2006.

menyalurkan kredit menengah dan besar yang berbiaya operasional relatif kecil. Tentunya LKM tersebut menjadi tidak kompetitif dan akan selamanya bergantung pada subsidi. Bahkan sering kali dengan adanya subsidi bunga dari pemerintah justru membuat debitor menganggap dana yang dipinjam sebagai hibah.

Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk pemerintah untuk menjangkau masyarakat termiskin tidak memenuhi syarat *sustainability*. Sementara lembaga keuangan semacam BPR dan Perbankan yang *sustainable* tidak mampu menjangkau masyarakat termiskin karena terhalang peraturan BI yang mewajibkan adanya jaminan (*colateral*). Disinilah seharusnya pemerintah berperan, yaitu sebagai penengah dalam membentuk lembaga keuangan yang *sustain* sekaligus menjangkau masyarakat termiskin. Selama ini program-program dana bergulir untuk mengatasi kemiskinan dijalankan oleh berbagai instansi di beberapa departemen. Seringkali program-program yang mereka jalankan tidak saling terkait dan kurang terkoordinasi dengan baik. Faktor politik mengakibatkan pengelolaan program-program tersebut tidak berlandaskan pada aspek ekonomi. Sehingga program pengentasan kemiskinan di Indonesia selama ini cenderung tidak efektif dan hanya menjadi komoditas politik pejabat pemerintahan.

Di tengah banyaknya kegagalan pemerintah dalam menyalurkan dana bergulir bagi pemberdayaan usaha mikro dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya, Kabupaten Tangerang muncul sebagai revolusioner kredit mikro di Indonesia. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), Kabupaten Tangerang Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPP UMKM) untuk menyalurkan dana pinjaman bagi masyarakat termiskin di daerah tersebut. LPP UMKM dijalankan dengan bentuk replikasi Grameen Bank.

Keberhasilan LPP UMKM dalam menyalurkan dana bergulir pemerintah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah NPL yang selalu di bawah 1%, jumlah anggota dari 564 pada awal pembentukan tahun 2003 hingga hampir mencapai 17.000 anggota pada awal 2008, dan kumulatif pinjaman yang disalurkan dari semula Rp. 223.600.000,- di tahun 2003, di awal tahun 2008 mencapai Rp. 40 milyar (selanjutnya dijelaskan dalam Bab III).

## **I.2. Perumusan Masalah**

Keberhasilan LPP UMKM Kabupaten Tangerang dalam menyalurkan dana pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat menjadi *best practice* bagi pemerintah daerah lain maupun pemerintah pusat dalam menyalurkan program dana bergulir mereka. Keberhasilan LPP UMKM Kabupaten Tangerang untuk tetap *sustain* dan kinerjanya yang terus meningkat merupakan nilai tambah yang tidak banyak dimiliki oleh program-program serupa yang diselenggarakan pemerintah. Akan tetapi, dari segi keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan anggotanya dan mengangkat mereka dari kemiskinan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya.

Syarat LKM ke empat yang sudah disebut di atas adalah “memastikan adanya dampak yang terukur”. Selama ini belum ada penelitian mengukur dampak LPP UMKM. Sebagai LKM yang menganut sistem Grameen Bank, seharusnya LPP UMKM memenuhi keempat syarat tersebut. Untuk dapat membuktikan bahwa program replikasi Grameen Bank yang dilakukan oleh LPP UMKM Kabupaten Tangerang bermanfaat terutama dalam hal mengurangi angka kemiskinan, maka diperlukan pembuktian dengan meneliti dampak LPP UMKM Kabupaten Tangerang terhadap tingkat kemiskinan anggotanya. Untuk itu perlu diteliti dan dibuktikan lebih lanjut melalui perumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang sebelum dan setelah menjadi anggota?
2. Bagaimana hubungan korelasi antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya?
3. Bagaimana hubungan regresi (sebab akibat) antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga sebelum dan setelah menjadi anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang.



2. Menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan korelasi antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.
3. Menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan regresi (sebab akibat) antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.

#### **I.4. Hipotesis**

Penelitian ini memiliki hipotesis:

1. Karena durasi pinjaman program kredit mikro yang dijalankan oleh LPP UMKM Kabupaten Tangerang adalah 6 bulan yang kemudian akan dievaluasi dan akan bertambah jumlah pinjamannya jika usahanya *perform*, maka semakin lama menjadi peserta kredit mikro, maka tingkat kemiskinannya akan semakin berkurang.
2. Tingkat kemiskinan anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang juga dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga bersangkutan dan ketersediaan infrastruktur di desa tempat ia tinggal.
3. Program kredit mikro LPP UMKM tidak hanya berdampak pada tingkat kemiskinan, namun juga pada kesadaran akan pentingnya pendidikan, keluarga berencana dan produktivitas.

#### **I.5. Metode Penelitian**

Penulis melakukan pencarian model dari penelitian terdahulu yang sesuai jika diterapkan pada skala Kabupaten dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Tangerang. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, diantaranya oleh Mallick, D. (2000)<sup>7</sup>, Wahid, A.N.M. (1994)<sup>8</sup>, Hossain, M. (1986)<sup>9</sup> dan Chowdury, Ghosh dan Wright (2005)<sup>10</sup>. Dengan perbandingan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Mallic, Debdulal (2000). BRAC's Contribution to Gross Domestic Product of Bangladesh. *BRAC Research Monograph Series No. 17*.

<sup>8</sup> Wahid, Abu N. M. (1994). The Grameen Bank and Poverty Allevation in Bangladesh: Theory, Evidence and Limitations. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 1. (Jan., 1994), pp. 1 – 15.

Tabel I. 2. Perbandingan Metodologi Penelitian Terdahulu

Peneliti	Mallick	Wahid	Hossain	Chowdury, dkk.
<b>Judul Penelitian</b>	BRAC's Contribution to GDP of Bangladesh	The Grameen Bank and Poverty Alleviation in Bangladesh: Theory, Evidence and Limitations	Credit for Allevation of Rural Poverty: The Experience of Grameen Bank in Bangladesh	The Impact of Micro-credit on Poverty: Evidence from Bangladesh
<b>LKM yang diteliti</b>	BRAC	Grameen Bank (GB)	Grameen Bank (GB)	GB, ASA, BRAC
<b>Subjek yang diteliti</b>	Seluruh aktivitas BRAC (nasabah, organisasi, supplier)	Seluruh nasabah GB	Seluruh nasabah GB	Sampel anggota GB, ASA, BRAC
<b>Variabel dependen</b>	Nilai Tambah BRAC terhadap GDP	Kepemilikan modal	tingkat kemiskinan	tingkat kemiskinan objektif dan subjektif
<b>Variabel independen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nilai tambah BRAC sebagai organisasi</li> <li>- nilai tambah <i>input supply</i></li> <li>- nilai tambah dari usaha nasabah</li> <li>- nilai tambah dari kegiatan sosial BRAC</li> <li>- I-O sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah pinjaman</li> <li>- produktifitas aset</li> <li>- tingkat bunga kredit</li> <li>- tingkat tabungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nilai total kredit yg disalurkan GB</li> <li>- efektivitas kredit</li> <li>- kepemilikan lahan anggota</li> <li>- nilai kredit anggota</li> <li>- penggunaan kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- program kredit mikro</li> <li>- kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga</li> <li>- kondisi infrastruktur desa</li> </ul>
<b>Hasil penelitian</b>	Nilai Tambah BRAC terhadap GDP Bangladesh mengalami peningkatan, 1995: 0,702%, 1996: 0,805%, 1997: 0,966%, 1998: 1,148%.	GB berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan di Bangladesh	Anggota GB mengalami peningkatan kesejahteraan setelah bergabung dengan GB	Terjadi penurunan tingkat kemiskinan objektif dan subjektif anggota GB dari semenjak bergabung hingga lebih dari 8 tahun menjadi anggota

<sup>9</sup> Hossain, Mahabub (1986). Credit for Allevation of Rural Poverty: The Experience of Grameen Bank in Bangladesh. *Early Impact of Grameen: A Multy Dimensional Analysis: Outcome of a BIDS Research Study*. Grameen Trust, pp. 127 – 175.

<sup>10</sup> Chowdury, M.J.A., Ghosh, D. dan Wright, R.E. (2005). The Impact of Micro-credit on Poverty: Evidence from Bangladesh. *Progress in Development Studies* 5, 4, pp. 298 – 309.

Metodologi penelitian Mallick, D. (2000) dapat mengukur dampak LKM terhadap perekonomian suatu wilayah (negara, propinsi, kabupaten/kota), tidak hanya terhadap kemiskinannya saja. Akan tetapi, kesulitannya adalah tingkat kerumitan yang relatif tinggi bagi penelitian calon sarjana ekonomi dan ketersediaan data yang kurang memenuhi, terutama I-O sektoral Kabupaten Tangerang jika ingin menghitung nilai tambah LPP UMKM terhadap PDRB Kabupaten Tangerang.

Metodologi penelitian Wahid, A.N.M. (1994) dan Hossain, M. (1986) sama-sama dapat mengukur dampak LKM dalam mengurangi angka kemiskinan, dilihat dari kepemilikan modal dan pendapatan anggotanya. Akan tetapi metodologi ini menggunakan data seluruh kantor cabang LKM (GB) dan seluruh nasabah LKM yang tentunya akan membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil penelitian.

Metodologi penelitian Chowdury, Ghosh dan Wright (2005) dapat mengukur dampak kredit mikro terhadap tingkat kemiskinan. Responden yang diteliti merupakan sampel dari seluruh warga Bangladesh yang menjadi anggota program kredit mikro baik yang dilakukan oleh BRAC, ASA maupun Grameen Bank. Metode sampling dengan mengkategorikan responden berdasarkan lamanya ia menjadi anggota LKM. Data yang digunakan juga relatif mudah didapat. Untuk memperkuat penelitian, metode ini didukung dengan metode statistika deskriptif.

#### **1.5.1. Metode Statistika Deskriptif**

Metode ini digunakan untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga sebelum dan setelah menjadi anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang serta menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan korelasi antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.

Sebelum menjadi anggota, para calon anggota LPP UMKM disurvei terlebih dahulu yang disebut dengan Uji Kelayakan (UK). Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi keluarga calon anggota (kuesioner UK dapat dilihat pada lampiran 1). Dalam kuesioner UK tersebut tercakup kondisi rumah (nilai indeks rumah), kepemilikan aset, karakteristik

anggota rumah tangga (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan), penguasaan lahan di luar rumah tinggal (tanah, sawah, kebun/tegalan dan kolam), dan pendapatan per kapita.

Metode ini menggunakan perbandingan data UK sampel anggota LPP UMKM sebelum menjadi anggota LPP UMKM dengan kondisi saat ini. Data kondisi saat survey (April 2008) didapat dengan menggunakan kuesioner yang mencakup informasi yang sama dengan UK ditambah beberapa pertanyaan tambahan untuk metode regresi probit (kuesioner dapat dilihat pada lampiran 2). Metode ini menggunakan *software* Microsoft Excel 2007.

### 1.5.2. Metode Regresi Logit

Metode ini digunakan untuk menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan regresi (sebab akibat) antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.

Model regresi logit menggunakan model yang telah digunakan Chowdury, Ghosh dan Wright (2005) pada kasus kredit mikro dan kemiskinan di Bangladesh dengan sedikit modifikasi sesuai dengan karakter wilayah responden. Sampel dibatasi pada anggota LPP UMKM yang dikategorikan berdasarkan lamanya ia menjadi anggota. Adapun rancangan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Prob}(P = 1) = f(X_P, X_H, X_V)$$

$P$  adalah variabel dummy yang berkode 1 jika rumah tangga tergolong miskin dan kode 0 jika rumah tangga tergolong tidak miskin. Kategori miskin menggunakan metode kemiskinan objektif, yaitu menggunakan standar garis kemiskinan BPS.  $X_P$  adalah vektor keikutsertaan dalam program kredit mikro.  $X_H$  adalah vektor rumah tangga yang menjelaskan karakter sosial dan ekonomi individu atau rumah tangga.  $X_V$  adalah vektor karakteristik dan infrastruktur desa.

$X_P$  diestimasi dengan  $T$  sebagai durasi keikutsertaan pada program kredit mikro yang dihitung dalam satuan bulan:

$$X_P^1 = f(T)$$

Model  $X_H$  adalah sebagai berikut:

$$X_H = f(L, E_f, E_m, F_L, M_L)$$

Dimana  $L$  adalah kepemilikan lahan pertanian/produktif ( $m^2$ ),  $E_f$  adalah tingkat pendidikan anggota keluarga wanita tertinggi (tahun sekolah),  $E_m$  adalah tingkat pendidikan anggota keluarga pria tertinggi (tahun sekolah),  $F_L$  adalah jumlah anggota keluarga wanita yang termasuk usia angkatan kerja,  $M_L$  adalah jumlah anggota keluarga pria yang termasuk usia angkatan kerja.

Model  $X_V$  adalah sebagai berikut:

$$X_V = f(D_{SD}, D_{SMP}, D_W, D_{EI}, JM, JR, JC)$$

$D_{SD}$  adalah variabel dummy berkode 1 jika terdapat SD di desanya,  $D_{SMP}$  adalah variabel dummy berkode 1 jika terdapat SMP di desanya,  $D_W$  adalah variabel dummy berkode 1 jika terdapat sumber air bersih di desanya,  $D_{EI}$  adalah variabel dummy berkode 1 jika terdapat aliran listrik di desanya,  $JM$  adalah jarak dari rumah ke pasar terdekat (km),  $JR$  adalah jarak dari rumah ke jalan beraspal (km),  $JC$  adalah jarak dari rumah ke pusat kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang (km).

Sehingga jika digabung akan berbentuk persamaan:

$$\text{Prob}(P = 1) = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 L + \beta_3 E_f + \beta_4 E_m + \beta_5 F_L + \beta_6 M_L + \beta_7 D_{SD} \\ + \beta_8 D_{SMP} + \beta_9 D_W + \beta_{10} D_{EI} + \beta_{11} JM + \beta_{12} JR + \beta_{14} JC$$

Model di atas diregresi menggunakan *software* Eviews 4.0.

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran singkat mengenai isi skripsi ini yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 adalah kerangka teoritis yang berisi penjelasan teoritis mengenai keuangan mikro dan kemiskinan. Teori-teori ini dikaji dari literatur-literatur yang relevan dan berhubungan mengenai permasalahan tersebut. Penelitian-penelitian lain yang sedikit banyak mempengaruhi pengamatan penulis terhadap permasalahan ini akan diuraikan pula disini sebagai bahan perbandingan.

Bab 3 adalah profil LPP UMKM Kabupaten Tangerang. Bab ini menjelaskan profil LPP UMKM Kabupaten Tangerang dari latar belakang dan

sejarah pendiriannya hingga operasional lembaga ini sejak berdiri sampai dengan sekarang.

Bab 4 adalah metodologi dan data. Dalam bab ini akan dibahas dasar-dasar teori ekonometrika dan analisis kuantitatif yang menunjang dan diaplikasikan dalam penelitian ini. Selain itu juga membahas spesifikasi model yang digunakan dalam perhitungan ekonometrika, variabel-variabel yang akan diestimasi, metode perhitungan, asumsi yang digunakan, serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini.

Bab 5 adalah hasil estimasi dan analisis. Dalam bab ini akan dilaporkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan software eviews dan microsoft excel. Isi dari bab ini adalah penjelasan output yang diperoleh dari pengolahan data.

Bab 6 adalah kesimpulan dan saran kebijakan. Bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran yang disarikan dari penelitian ini. Selain itu juga akan menyertakan penjelasan mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, agar dikemudian hari dapat dilakukan penyempurnaan studi untuk hasil yang lebih baik.